

URGENSI PENGATURAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PIHAK PELAPOR ATAS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Made Riyaldi¹, Bambang Winarno², Abdul Rachmad Budiono³

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: notarismaderiyaldi@gmail.com

Abstract

One mode of money laundering is often used of late is the buying and selling of land and or building/real estate. By langsung or indirectly this mode involves a notary and PPAT as officials make the authentic deed of sale and purchase of real estate subject. One of the factors that cause the mode of money laundering by using this lively real estate is not dikategorikannya the notary and PPAT as the rapporteur in the money laundering Act. Thus, it appears the problem about: How did the concept of notary and PPAT settings as the rapporteur over suspicious financial transactions related to money laundering criminal offence in law PPTPPU?". The purpose of this research is to find out, analyze and find the concept of Notary and PPAT settings as the rapporteur over suspicious financial transactions related to money-laundering a criminal offence. Research methods used in this research is a journal using the normative approach to statutory and conceptual approach. Furthermore, in processing are analyzed using the methods of interpretation extensively.

Based on the results of the research, it can be inferred that the Notary and PPAT dikategorikannya not as the rapporteur is one of the factors supporting the rise of the datu practice money laundering through real estate. And the concept of Notary and PPAT settings as the rapporteur over suspicious financial transactions related to money laundering is a criminal offence by way of adding the categories of Non-Financial Businesses and Professions such as Notary and PPAT into article 17, paragraph (1) of Act No. 8 of 2010.

Key words: notary, PPAT, reporting parties, suspicious transactions, money laundering

¹ Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

² Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing Kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Abstrak

Salah satu modus pencucian uang yang sering digunakan akhir-akhir ini adalah jual beli tanah dan atau bangunan/ *real estate*. Secara langsung atau tidak langsung modus ini melibatkan Notaris dan PPAT sebagai pejabat yang membuatkan akta otentik perihal jual beli *real estate*. Salah satu faktor yang menyebabkan modus pencucian uang dengan menggunakan *real estate* ini marak adalah tidak dikategorikannya Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor dalam undang-undang pencucian uang. Dengan demikian, maka muncul permasalahan mengenai: Bagaimanakah konsep pengaturan notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang ke dalam UU PPTPPU?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis serta menemukan konsep pengaturan Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selain itu dalam pengolahandianalisis dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak dikategorikannya Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor merupakan salah satu faktor penunjang maraknya praktik pencucian uang melalui *real estate*. Serta konsep pengaturan Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang adalah dengan cara menambahkan kategori *Non-Financial Businesses and Professions* seperti Notaris dan PPAT ke dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010.

Kata kunci: notaris, PPAT, pihak pelapor, transaksi keuangan mencurigakan, tindak pidana pencucian uang

Latar Belakang

Salah satu kejahatan *white collar crime* yang mendapat perhatian khusus dari dunia internasional termasuk Indonesia adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering*. Mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering* sampai sekarang masih belum terdapat definisi atau pengertian yang universal dan komprehensif.⁴ Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa dimaksud dengan pencucian uang, karena dalam UU PPTPPU hanya menyebutkan

⁴ R. Wiyono, **Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, halaman 21

bahwa “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.⁵ Secara etimologis, istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*money*” yang dapat diartikan sebagai uang dan “*laundering*” yang juga dapat diartikan sebagai “pencucian”, jadi, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa *money laundering* merupakan pencucian uang harta yang diperoleh dari hasil kejahatan kemudian disembunyikan dan disamarkan sehingga tampak harta tersebut mendapatkan legitimasi hukum.⁶ Selanjutnya definisi atau pengertian TPPU telah banyak diutarakan oleh para ahli hukum, salah satunya adalah Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan TPPU atau *money Laundering* sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang haram dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat tampak seperti uang yang halal ketika dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut. Sutan Remy Sjahdeini menambahkan tujuan utama pelaku pencucian uang adalah untuk menghindari tindakan para penegak hukum yang mengancam harta haram tersebut.⁷

Menurut Nicholas Clark pada umumnya proses pencucian uang terdiri dari tiga tahap yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.⁸ Tahap Pertama adalah *placement* merupakan tahap permulaan, mengubah uang hasil kejahatan ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan, misalnya memasukkannya dalam deposito pada bank, polis asuransi atau membeli rumah, kapal pesiar, perhiasan.⁹ Tahap pencucian uang yang Kedua adalah *layering* yaitu tahap pelapisan dimana pelaku menjalankan transaksi yang berlapis dan *anonimitas*. Pelaku kejahatan Menggunakan “*wire transfer*” melalui berbagai rekening, uang dapat dikirim ke

⁵ *Ibid*, halaman 21

⁶ Edi Setiadi dan Rena Yulia, **Hukum Pidana Ekonomi**, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, halaman 153.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, **Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme**, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007, halaman 5.

⁸ Nicholas Clark, **The Impact of Recent Money Laundering Legislation on Financial Intermediaries**, Dick J. Int'l.L, vol. 14, halaman 470.

⁹ Daniel Mulligan, **Know Your Customer Regulations and The International Banking System :Towards A General Self Regulatory Regime**, Fordham International Law Journal, vol. 22, 1999, halaman 2330.

berbagai negara, sehingga sulit untuk melacak asal muasal dana tersebut¹⁰ Tahap terakhir adalah *integration* dimana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali harta yang diperoleh dari kejahatan dimasukan atau dicampur kedalam transaksi yang sah, sehingga tidak kelihatan sebenarnya dana tersebut semula berasal dari tindakan ilegal. Salah satu contoh tahap *Integration* dilakukan dalam bentuk penjualan kembali saham, rumah, kapal atau perhiasan tadi¹¹

Berhubung TPPU atau *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya, sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yuridiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja hanya ditingkat nasional melainkan sampai pada tingkat internasional.¹² Akibat TPPU juga secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada sistem perekonomian suatu negara.¹³ Oleh karena itu negara-negara yang tergabung dalam G-7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat pada tahun 1989 membentuk suatu lembaga yang khusus memerangi TPPU atau *money laundering* yaitu *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Tugas pokok dari FATF ini adalah untuk menetapkan kebijakan, mendorong perang dan perlawanan terhadap praktik TPPU. Sebagai bentuk perlawanan terhadap TPPU, FATF kemudian mengeluarkan Rekomendasi yang dikenal dengan *40+9 Recommendation*.¹⁴

Dalam perkembangannya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dibentuklah Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Walaupun sudah dua kali mengalami perubahan, UU PPTPPU ini dinilai masih kurang optimal dalam mencegah dan memberantas TPPU. Salah satu kelemahan yang

¹⁰ Robert E. Taylor, **Ex-Smuggler Tells of Huge Profits Laundered, Placed at Major Banks**, Wall St. J. (February 12, 1988) halaman. A. 4.

¹¹ Erman Rajagukguk, **Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang**. Halaman 2

¹² *Ibid*, halaman 3

¹³ Bismar Nasution, **Rezim Anti Money Laundering di Indonesia**, Bandung, BooksTerrace & Library, 2008, halaman 1

¹⁴ Yunus Husein, **Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional**, 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Halaman 5

ada di UU PPTPPU adalah sempitnya cakupan pihak pelapor¹⁵ yang diwajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan¹⁶ kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pihak Pelapor merupakan pihak yang penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU mengingat pihak pelaporlah yang berhadapan secara langsung dengan pelaku kejahatan yang ingin melakukan pencucian uang. Peran penting yang dimainkan oleh pihak pelapor dalam pemberantasan dan pencegahan TPPU ini dikarenakan UU PPTPPU memberikan beberapa kewajiban pokok yang harus dilakukan oleh pihak pelapor, kewajiban pertama adalah pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Consumer*). Melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini pelapor berkewajiban melakukan identifikasi dan verifikasi Pengguna, kewajiban kedua yang dibebankan kepada pihak pelapor adalah adanya kewajiban bagi pihak pelapor untuk melaporkan apabila adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa.¹⁷

Pada saat ini pihak-pihak yang menjadi pihak pelapor sebagaimana yang ditentukan dalam UU PPTPPU dibagi menjadi dua yaitu, pertama pihak yang dikategorikan termasuk penyedia jasa keuangan (PJK) yang terdiri dari bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, custodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara

¹⁵ Menurut pasal 1 angka 11 UU PPTPPU definisi pihak pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang (Pasal 17 ayat 1 UU PPTPPU) ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK..

¹⁶ Menurut pasal 1 angka 5 UU PPTPPU definisi dari Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana,

¹⁷ Fithriadi Muslim, Journal on anti money Laundering, "**Fungsi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**", Depok, Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Indonesia Indonesia Research Center for AML-CFT (IRCA), 2013, halaman 15

alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *ewallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Kedua pihak yang dikategorikan sebagai Penyedia barang dan/atau jasa terdiri dari perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik; atau, balai lelang¹⁸

Dapat dilihat bahwa pada pasal 17 ayat 1 UU PPTPPU nampaknya pembuat undang-undang masih fokus pada pencegahan dan pemberantasan TPPU pada sektor PJK. Hal ini dapat dilihat bahwa kategori profesi khususnya notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dikategorikan sebagai pihak pelapor sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 17 ayat 1 UU PPTPPU. Padahal negara-negara seperti Prancis, Rumania, Kanada, Belgia, Spanyol, Italia, Australia, bahkan Belanda sudah memperluas cakupan pihak pelapor hingga profesi termasuk di dalamnya adalah Notaris dan PPAT. Di negara-negara tersebut notaris dan PPAT wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna barang/jasa kepada aparat penegak hukum.¹⁹ Tidak dimasukkannya profesi notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi mencurigakan yang dilakukan klien ini kontras dengan rekomendasi FATF nomor 16 yang menjelaskan bahwa profesi-profesi tertentu seperti advokat, notaris, akuntan publik, kurator kepailitan, PPAT, dan konsultan bidang keuangan pada saat mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk dan/atau atas nama kliennya harus menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada pejabat yang berwenang.

Dengan tidak dikategorikan profesi notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor dalam mencegah dan memberantas TPPU mengakibatkan tidak adanya kewajiban hukum bagi notaris dan/atau PPAT untuk melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan para pihak. Imbas dari tidak dimasukkannya profesi notaris sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan adalah pelaku kejahatan memanfaatkan jasa Notaris dan

¹⁸ Pasal 17 ayat 1 UU PPTPPU

¹⁹ Adrian Sutedi, **Tindak Pidana Pencucian Uang**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008, halaman 264

PPAT untuk membantu menyembunyikan dan menyamarkan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan. Modus-modus pencucian uang yang akhir-akhir ini sering digunakan oleh para pelaku adalah dengan membeli *real estate*/ properti rumah dengan memanfaatkan sarana profesi Notaris dan PPAT. Menurut Yunus fakta yang terjadi di masa kini adalah pelaku pencucian uang tidak menggunakan nama-nama mereka sendiri dalam melakukan transaksi dan kepemilikan aset. Kepemilikan aset atas nama mereka tentu akan mempermudah upaya pelacakan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan pencucian uang menggunakan orang lain sebagai sarana menyembunyikan dan menyamarkan asal mula harta kekayaan tersebut.²⁰ Dalam hal ini pelaku kejahatan mengatasnamakan saudara atau kerabat mereka dalam kepemilikan harta pelaku.

Profesi notaris dan PPAT yang terhormat yang bertugas melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata seharusnya tidak dijadikan sarana pencucian uang oleh pelaku kejahatan. Hal ini justru akan mencoreng profesi notaris dan PPAT dan akan memunculkan stigma negatif di mata masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai profesi notaris dan PPAT agar dimasukkan sebagai pelapor yang wajib melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh para pihak. Dengan dimasukkannya notaris dan PPAT sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan maka secara tidak langsung notaris dan PPAT berperan secara langsung mewujudkan negara yang bersih, damai dan sejahtera. Selain itu secara langsung laporan TKM yang dilakukan oleh notaris dan PPAT membawa dampak positif bagi notaris dan PPAT itu sendiri. Dampak positif pertama adalah laporan TKM yang dilakukan oleh notaris dan PPAT dapat mengembalikan citra notaris dan PPAT yang selama ini dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Selain itu dampak positif yang secara nyata dirasakan oleh notaris dan PPAT yang dikategorikan sebagai pihak pelapor adalah adanya suatu perlindungan hukum dari negara karena dalam ketentuan pasal 29 UU PTPPU²¹ mengatakan bahwa pihak pelapor dalam

²⁰ *ibid*, Halaman 26

²¹ Pasal 29 UU PTPPU “Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini”.

menjalankan tugasnya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana kecuali terdapat unsur menyalahgunakan wewenangnya

Berdasarkan uraian di atas maka timbul suatu permasalahan mengenai pasal 17 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UU PPTPPU), profesi Notaris dan PPAT tidak dikategorikan sebagai pihak pelapor, Bagaimanakah konsep pengaturan notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang ke dalam UU PPTPPU?

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui, menganalisis serta menemukan konsep pengaturan notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang ke dalam UUPPTPPU

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Normative Legal Research*). Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, yakni perihal konsep pengaturan notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang ke dalam UUPPTPPU

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, serta artikel-artikel dari internet.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan berkenaan dengan urgensi pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Terlebih dahulu dideskripsikan secara kualitatif dengan penguraian proposisi-proposisi hukum

sesuai permasalahan yang dikaji, Bahan hukum yang ada tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa, dan metode interpretasi ekstensif yakni metode penafsiran yang membuat interpretasi yang melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.²²

Pembahasan

Pada saat ini modus pencucian uang telah bergeser, dimana dahulu modus pencucian uang lebih difokuskan pada lembaga perbankan namun seiring dengan semakin ketatnya lembaga perbankan di Indonesia maka modus pencucian uang bergeser ke jual beli *real estate*. Secara langsung maupun tidak langsung modus-modus ini menggunakan sarana notaris dan PPAT untuk mencapai tujuannya yaitu mencuci uang haram menjadi uang halal. Notaris dan PPAT yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai bukti telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat secara langsung dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang. Bahkan pada prakteknya tidak jarang notaris dan PPAT ikut serta berperan dalam merekayasa bisnis atau investasi dalam dan luar negeri sehingga seolah-olah hal tersebut memiliki legitimasi hukum. Tidak jarang juga pelaku pencucian uang memberikan kuasa kepada notaris atas nama mereka menyimpan, melakukan jual beli, menginvestasikan dana, dan aktifitas lain untuk menutupi tujuan utamanya yaitu menyamarkan dan menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh dari hasil kejahatan.²³ Dengan dimanfaatkannya notaris dan PPAT sebagai sarana pencucian uang ini membuat beberapa dampak negatif terhadap negara dan juga terhadap notaris dan PPAT sendiri, dampak-dampak negatif itu antara lain:

A. Tidak Maksimalnya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

²² Jazim Harnidi, **Hermeneutika Hukum**, UII Press, Yogyakarta, 2005, halaman.53.

²³ Yunus Husein, *Journal On Anti Monye Laundering "Urgensi Gatekeeper Sebagai Pelapor Dalam Rezim Anti-Pencucian Uang Indonesia"* Depok, Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Indonesia Indonesia Research Center For Aml-Cft (Irca), 2013, Halaman 30

Paradigma *follow the money*²⁴ ini dalam memberantas tindak pidana pencucian uang kurang efektif apabila tidak didukung dengan adanya laporan-laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pihak pelapor. Laporan TKM ini merupakan salah satu unsur yang paling efektif dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Laporan TKM yang diberikan oleh pihak pelapor kepada PPATK merupakan langkah awal bagi PPATK untuk menelusuri para pelaku yang terlibat dalam pencucian uang serta menelusuri aliran dana yang dilakukan pelaku TPPU. Dengan mengetahui aliran dana TKM juga sangat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap aktor-aktor dibalik tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Dampak dari Notaris dan PPAT yang tidak dikategorikan sebagai pihak pelapor adalah Notaris dan PPAT tidak berkewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa. Padahal modus pencucian uang dengan menggunakan modus jual beli *real estate* sedang marak terjadi di Indonesia. Dengan tidak melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Padahal pada dasarnya pembangunan rezim anti pencucian yang kuat membutuhkan kerja sama antara pihak pelapor, masyarakat, serta aparat penegak hukum.

B. Modus pencucian uang melalui jual beli *real estate* semakin marajalela

Seiring dengan semakin ketatnya lembaga-lembaga perbankan membuat para pelaku pencucian uang untuk mengalihkan modus pencucian uangnya ke jual beli *real estate*/ tanah dan/atau bangunan. Modus pencucian uang dengan cara jual beli *real estate* ini menjadi *trend* saat ini digunakan oleh pelaku kejahatan yang ingin

²⁴*follow the money* (“menelusuri aliran uang”) merupakan pendekatan baru untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang mengejar pelaku tindak pidana atau *follow the suspect* karena pelaku atau saksi bisa saja berkata bohong, tetapi aliran uang tidak akan bisa ditutup-tutupi. Paradigma baru dalam penanganan kejahatan ini juga memudahkan penegak hukum untuk menelusuri tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain dan tujuan yang paling utama adalah mengembalikan kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Perlu dicatat bahwa hasil-hasil kejahatan merupakan “*lifeblood of the crime*”.

melakukan pencucian uang. Setidaknya ada dua faktor pendukung mengapa pelaku pencucian uang pada saat ini lebih banyak menggunakan modus pencucian uang dengan cara jual beli *real estate* yaitu, pertama *real estate* merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat menjanjikan mengingat nilai ekonomisnya terus mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun. Faktor pendukung kedua mengapa pelaku pencucian uang pada saat ini lebih banyak menggunakan modus pencucian uang adalah Notaris dan PPAT tidak dikategorikan sebagai pihak pelapor dalam UU PPTPPU. Tidak seperti lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan yang dikategorikan sebagai pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan apabila terdapat transaksi keuangan mencurigakan terkait TPPU, Notaris dan PPAT tidak diwajibkan untuk melaporkan apabila terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang, Modus pencucian uang dengan menggunakan modus jual beli *real estate* ini dilakukan dengan dua cara yang pertama jual beli *real estate* dilakukan dengan pemalsuan identitas oleh pengguna jasa, yang kedua jual beli *real estate* dilakukan dengan atas nama sanak saudara atau orang lain.

Hasilnya kasus TPPU di Indonesia dengan modus jual beli *real estate* semakin marajalela. Contoh kasus yang masih hangat diperbincangkan adalah mantan korlantas mabes Polri Irjen Djoko Susilo yang terjerat kasus simulator Surat Ijin Mengemudi, Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathanah atas kasus suap impor daging sapi, dan kasus yang melibatkan beberapa pejabat lain. Mereka ini selain dijerat dengan undang-undang korupsi, mereka juga dijerat dengan UU PPTPPU karena mereka telah mencuci uang hasil dari tindak pidana korupsi.

C. Tercorengnya profesi Notaris dan PPAT karena dijadikan sarana pencucian uang oleh pelaku pencucian uang

Sebagai pejabat umum publik notaris dan PPAT hendaknya taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik. Notaris dan PPAT dalam menjalankan profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya di bidang hukum. Namun akhir-akhir ini profesi notaris dan PPAT dimanfaatkan

jasanya oleh pelaku pencucian uang untuk memuluskan aksinya untuk melakukan pencucian uang terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dengan dijadikan sebagai sarana pencucian uang baik langsung maupun secara tidak langsung membuat citra profesi Notaris dan PPAT tercoreng. Selain merusak citra personal notaris, dimanfaatkannya notaris dan PPAT juga merusak citra lembaga notariat dan PPAT.

D. Notaris dan PPAT dapat dijadikan tersangka sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.

Selain dapat menjerat pelaku pencucian uang, aparat penegak hukum juga dapat menjerat pihak-pihak yang ikut terlibat atau ikut turut serta membantu dalam menjalankan proses pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa profesi notaris dan PPAT secara langsung maupun tidak langsung dimanfaatkan oleh pelaku untuk memuluskan niatnya untuk melakukan pencucian uang. Dalam hal ini notaris dan PPAT juga dapat dikenakan pasal 3 UU PPTPPU²⁵ sebagai pihak yang turut serta membantu pencucian uang. Unsur subyektif dari pasal 3 UU PPTPPU ini ada dua yaitu “yang diketahuinya” dan “patut diduganya”. Notaris yang dalam menjalankan jabatannya sudah mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh klien adalah berindikasi pencucian uang namun tetap memberikan pelayanan dengan menjadi wadah penyimpanan uang pelaku sebenarnya dapat dikenakan pasal 5 UU PPTPPU²⁶ menyatakan bahwa barang siapa yang menerima uang atau menguasai penempatan yang patut diduganya²⁷ merupakan hasil dari tindak pidana dapat dikenakan pencucian uang.

²⁵ Pasal 3 UU PPTPPU “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

²⁶ Pasal 5 UU PPTPPU Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

²⁷ Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Contoh kasus notaris yang didakwa pasal 3 dan 5 UU PPTPPU adalah notaris Sri Dewi (SD) di Bogor atas kasus kredit fiktif Bank Syariah Mandiri (BSM). Notaris SD, merupakan notaris yang ditunjuk langsung oleh pihak bank untuk membuat akta pengikat perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah. Notaris SD dinyatakan ikut bersalah karena merupakan notaris yang mengikat proses pengajuan kredit fiktif itu. SD juga diketahui membuat akta pembiayaan hanya dihadiri oleh tersangka Iyan Permana tanpa debitur lainnya padahal dalam akta tertuang bahwa terdapat debitur lain (tidak hanya iyan permana saja. Selain itu, dalam pembuatan akta tersebut SD hanya menggunakan sertifikat tanah berupa salinan (*fotocopy*) sebagai agunan. Atas jasanya tersebut SD menerima dana hasil kredit fiktif melalui transfer rekening sejumlah Rp2,6 miliar dan sejumlah uang tunai. Selain menerima sejumlah uang SD juga menerima pemberian satu unit mobil sedan Mercedes Benz C200. Atas perbuatannya tersebut, SD didakwa Pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Perbankan Syariah, Pasal 264 ayat 1 KUHP atas pemalsukan dokumen oleh notaris, serta Pasal 3 dan atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁸

Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat, dan pihak pelapor dalam membantu penegakan hukum khususnya UU PPTPPU. Dengan mendasarkan pada laporan dan/atau informasi dari Pihak Pelapor, instansi, atau pihak terkait lainnya, selanjutnya PPATK melakukan analisis apakah benar transaksi yang dilaporkan oleh pihak pelapor tadi betul merupakan transaksi yang bertujuan untuk melakukan pencucian uang. Dengan mengetahui aliran dana TKM juga sangat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap aktor-aktor dibalik tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Selain mengungkap tindak pidana pencucian uang, laporan TKM yang dilaporkan oleh pihak pelapor juga bermanfaat bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana awal yang dilakukan oleh pelaku yang selama ini tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Dalam proses pembuatan surat dakwaan, laporan TKM juga digunakan sebagai dasar bagi jaksa penuntut

²⁸Polisi tangkap notaris kredit fiktif BSM
<http://www.antaranews.com/berita/404016/polisi-tangkap-notaris-kredit-fiktif-bsm>, Kamis, 7
 November 2013 18:54 WIB, Ruslan Burhani

umum untuk membuat surat dakwaan dan pelaku dapat diadili menurut sistem hukum yang berlaku

Peran penting laporan TKM inilah yang sekarang ini merupakan harapan besar bagi aparat penegak hukum khususnya PPATK dalam mencegah dan memberantas TPPU. Pada saat ini laporan TKM dilakukan berasal dari pihak pelapor dan pelapor²⁹. Sampai saat ini laporan TKM yang masuk ke PPATK lebih dominan dilakukan oleh pihak pelapor dibandingkan yang dilakukan oleh pelapor. Artinya adalah partisipasi pelapor masih sangat minim dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas TPPU atau pelapor masih enggan untuk melapor kepada PPATK karena takut akan timbulnya ancaman-ancaman terhadap jiwa maupun harta bendanya atas laporan yang diberikan kepada aparat penegak hukum. Bagi pihak pelapor sendiri laporan TKM merupakan sebuah kewajiban hukum yang harus dilakukannya. Apabila pihak pelapor tidak melaporkan TKM atas transaksi mencurigakan maka pihak pelapor dapat dikenakan sanksi yang diberikan oleh lembaga pengawas, sanksi itu dapat berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau denda administratif.³⁰ Pelaku mulai tidak berani untuk melakukan pencucian uang melalui pihak-pihak yang pada saat ini dikenakan wajib lapor terutama lembaga perbankan karena aktivitas aliran uangnya bisa kapan saja diketahui oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu pelaku selalu berusaha mencari celah hukum untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan uang hasil kejahatannya salah satu modus yang akhir-akhir ini merajalela adalah dengan modus jual beli tanah dan/atau bangunan. Pelaku memanfaatkan jasa Notaris dan/atau PPAT yang sampai saat ini tidak dikategorikan sebagai pihak pelapor atas transaksi mencurigakan. Dalam hal ini telah terjadi

²⁹ UU PPTPPU membedakan definisi pelapor dan pihak pelapor dimana dalam pasal 83 ayat 1 UU PPTPPU memberikan definisi mengenai pelapor adalah setiap orang yang beriktikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan definisikan pihak pelapor dijelaskan dalam pasal 1 angka 11 sebagai setiap orang yang menurut UU PPTPPU yang wajib melaporkan laporan kepada PPATK. Adapun perbedaan yang mendasar antara pihak pelapor dan pelapor adalah inisiatif untuk melaporkan laporan TKM tersebut. Jika pelapor melaporkan TKM berdasarkan kesadaran diri dari pelapor berbeda dengan pihak pelapor dimana laporan TKM merupakan sebuah kewajiban hukum atau keharusan yang dibebankan oleh undang-undang untuk melaporkan segala transaksi keuangan mencurigakan terkait TPPU

³⁰ Pasal 30 ayat 3 UU PPTPPU

kekosongan hukum dalam UU PPTPPU dimana profesi Notaris dan PPAT tidak dikategorikan sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu sampai saat ini modus pencucian uang dengan cara jual beli tanah dan/atau bangunan merajalela. Banyak kasus pencucian uang dengan modus jual beli tanah dan/atau bangunan sampai sekarang dengan cara memalsukan dokumen pendukung ataupun dengan cara mengatasnamakan saudara atau orang lain atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan.

Perluasan pihak pelapor mencakup ke lembaga profesi sebenarnya sudah ada di dalam 40+9 recommendation yang dikeluarkan oleh FATF. Dalam rekomendasi FATF nomor 16 menjelaskan bahwa profesi-profesi tertentu seperti advokad, notaris, akuntan publik, kurator kepailitan, PPAT, dan konsultan bidang keuangan pada saat mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk dan/atau atas nama kliennya harus menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada pejabat yang berwenang. Demikian pula halnya dengan penyedia barang/jasa. Berdasarkan rekomendasi FATF nomor 12 penyedia barang/jasa harus menyampaikan transaksi keuangan tunai yang dilakukan oleh pengguna jasa dalam kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Jual beli *real estate*
- b. Pengelolaan uang, surat berharga, atau harta kekayaan lainnya dari klien
- c. Pengelolaan rekening bank dan perusahaan efek
- d. Keikutsertaan di dalam pembentukan, pengelolaan perusahaan, pengelolaan badan hukum, serta
- e. Jual beli perusahaan.³¹

Dalam rangka pembangunan rezim anti pencucian uang yang kuat dan efektif diperlukan pembaharuan hukum khususnya UU PPTPPU yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya. Pembaharuan UU PPTPPU harus mampu mengakomodir modus-modus pencucian uang yang semakin berkembang. Seperti saat ini modus-modus pencucian uang dengan cara jual beli *real estate* telah merajalela. Seharusnya notaris dan PPAT dalam menjalankan jabatannya dikategorikan sebagai pihak pelapor yang wajib melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Laporan yang diberikan oleh notaris dan PPAT

³¹ Adrian Sutedi, **Op.cit**, halaman 264

perihal adanya transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa, namun yang menentukan apakah transaksi tersebut benar-benar transaksi pencucian uang adalah tugas dari PPATK. Tugas dari notaris dan PPAT disini hanyalah menyampaikan informasi terkait para penghadap yang datang kepada notaris dan PPAT serta obyek jual beli yang secara logika hukum sulit dilakukan oleh penghadap. Laporan TKM yang diberikan oleh notaris dan PPAT kepada PPATK tidaklah menghilangkan prinsip dari notaris dan PPAT yang merupakan profesi yang mandiri. Laporan TKM yang dilaporkan oleh notaris dan PPAT merupakan salah satu wujud tanggung jawab dari semua Indonesia yang bersih, damai, serta sejahtera. Dengan dikategorikan sebagai pihak pelapor notaris dan PPAT ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum khususnya UU PTPPU. Negara-negara seperti Prancis, Rumania, Kanada, Belgia, Spanyol, Italia, Australia, bahkan Belanda. Sudah menerapkan pengaturan profesi sebagai pihak pelapor terkait tindak pidana pencucian uang

Dengan dikategorikannya Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas TKM terkait TPPU memberikan manfaat yang begitu besar kepada negara, masyarakat, bahkan kepada profesi notaris dan PPAT itu sendiri. Manfaat dengan adanya kebijakan ini bagi negara adalah membantu negara dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, jujur, dan sejahtera, Selain itu juga menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia bukanlah sarang pencucian uang dan mengangkat kembali reputasi Indonesia di mata internasional karena sebelumnya telah ditetapkan sebagai salah satu negara yang masuk dalam NCCTs. Manfaat bagi masyarakat adalah dengan adanya kebijakan/aturan tersebut maka uang hasil kejahatan yang ingin dikaburkan oleh pelaku kejahatan melalui pencucian uang akan dapat terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum tersebut dapat mengambil langkah-langkah hukum seperti perampasan uang hasil kejahatan tersebut. Dari sudut pandang pelaku maka dapat menghilangkan motivasi pelakunya untuk melakukan

kembali kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau sulit mereka lakukan.³²

Selain membawa manfaat bagi negara dan masyarakat adanya kebijakan yang mengatur profesi notaris dan PPAT sebagai pelapor dalam UU PPTPPU ini juga memberikan manfaat kepada notaris dan PPAT dimana dapat mengembalikan citra notaris dan PPAT yang selama ini dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Selain itu dampak positif yang secara nyata dirasakan oleh notaris dan PPAT yang dikategorikan sebagai pihak pelapor adalah adanya suatu perlindungan hukum dari negara karena dalam ketentuan pasal 29 UU PPTPPU³³ mengatakan bahwa pihak pelapor dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana kecuali terdapat unsur menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini menandakan bahwa notaris dan PPAT dalam menjalankan jabatannya dan sebagai pihak pelapor tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata oleh siapapun atas segala laporan TKM yang diberikan oleh notaris dan PPAT kepada PPATK.

a. Konsep Pengaturan Notaris dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada penjelasan diatas telah dijelaskan bahwa telah terjadi kekosongan hukum dalam UU PPTPPU dimana profesi Notaris dan PPAT tidak dikategorikan sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. Sampai saat ini terdapat dua pihak yang dikategorikan sebagai pihak pelapor dalam UU PPTPPU (pasal 17 ayat 1 UU PPTPPU) pertama pihak adalah penyedia jasa keuangan (PJK) dan penyedia barang dan atau jasa³⁴ Dalam pasal 17 ayat 1 telah

³² Edi nasution, **Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan**, Jakarta, Halaman 45

³³ Pasal 29 UU PPTPPU “Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini”.

³⁴ Pihak pelapor sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 ayat 1 UU PPTPPU terdiri dari 2 pihak, pihak pertama adalah penyedia jasa keuangan yang terdiri dari bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, custodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money dan/atau ewallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. pihak kedua yang dikategorikan sebagai Penyedia barang dan/atau jasa terdiri dari perusahaan properti/agen properti,

menentukan secara limitatif pihak-pihak yang menjadi pihak pelapor atas TKM terkait TPPU. Dalam pasal tersebut membagi pihak pelapor ke dalam dua golongan yaitu golongan penyedia jasa keuangan serta penyedia barang dan/atau jasa. Jika UU PPTPPU di Indonesia hanya membagi pihak pelapor menjadi dua golongan, berbeda dengan negara-negara seperti Prancis, Rumania, Kanada, Belgia, Spanyol, Italia, Australia, dan Belanda, Selain dua golongan yang termasuk dalam UU PPTPPU di negara-negara tersebut juga memasukan *Non-Financial Businesses and Professions* seperti pengacara, akuntan publik, notaris, PPAT, atau profesi-profesi lain yang ada di dalam negaranya.

Konsep notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas TKM terkait TPPU harus dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sebagai konsekuensi atas ketentuan pengecualian kerahasiaan akta yang melekat pada Notaris dan PPAT yang hanya bisa dibuka jika Undang-undang menentukan secara tegas. Jika penambahan kategori pihak pelapor dilakukan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah maka hal itu akan bertentangan dengan ketentuan pengecualian kerahasiaan akta sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Pembaharuan UU PPTPPU dengan menambahkan profesi notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait TPPU adalah dengan cara menambahkan ketentuan profesi dalam kategori pihak pelapor sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif oleh pasal 17 ayat 1 UU PPTPPU sehingga menjadi:

- (1) Pihak Pelapor meliputi:
a. penyedia jasa keuangan:

Bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, custodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan

yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. Penyedia barang dan/atau jasa lain:

perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, balai lelang.

c. Lembaga Profesi:

Advokat, Notaris, Kurator kepailitan, Akuntan publik, Pejabat pembuat akta tanah, Konsultan bidang keuangan,

(2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Selain konsep hukum yang mengatur notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas TKM terkait TPPU, Pembaharuan UU PPTPPU juga perlu mengatur mengenai laporan-laporan yang wajib dilaporkan oleh notaris dan PPAT. Peneliti berpandangan bahwa notaris dan PPAT wajib melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan tanpa memperhatikan besarnya nilai transaksi.

Selain mengatur mengenai kewajiban-kewajiban bagi pihak pelapor dalam melaporkan TKM, beberapa ketentuan dalam UU PPTPPU juga memberikan perlindungan hukum kepada pihak pelapor yang melaporkan adanya TKM kepada PPATK. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kunci keberhasilan negara dalam mencegah dan memberantas TPPU adalah keikutsertaan masyarakat terutama pihak pelapor dalam membantu aparat penegak hukum. Peran penting pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU seharusnya sejalan dengan perlindungan-perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Secara tidak langsung laporan yang diberikan oleh pelapor kepada aparat penegak hukum adalah perbuatan yang mengandung resiko yang besar terhadap keselamatan dirinya, keluarganya serta harta benda miliknya sehingga negara harus dapat memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor beserta keluarganya.

Perlindungan hukum bagi pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi dua yaitu sebelum berlakunya UU PPTPPU dan sesudah berlakunya UU PPTPPU. Sebelum berlakunya UU PPTPPU perlindungan atas hak-hak pelapor diatur dalam Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³⁵ Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.³⁶

Secara khusus perlindungan bagi Pelapor dan Saksi tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan teknis dalam pemberian perlindungan bagi pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan mengenai perlindungan khusus ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap pelapor dan Saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Bentuk perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta, perlindungan berupa

³⁵ Secara khusus Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur mengenai perlindungan bagi Pelapor, tetapi ketentuan yang ada dalam undang-undang ini berlaku untuk saksi dan korban semua tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang.

³⁶ Sri Rejeki, Tesis **Perlindungan Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**, Universitas Indonesia, Jakarta, halamn 79

kerahasiaan dan penyamaran identitas, dan memberikan keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara³⁷

Lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan KAPOLRI No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan khusus menurut Peraturan KAPOLRI ini adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan yang membahayakan diri jiwa dan atau hartanya termasuk keluarganya. Pemohon perlindungan khusus adalah pelapor, saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum atau hakim.

Pengaturan mengenai perlindungan bagi Pelapor dan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat di dalam Bab IX yaitu terdapat pada pasal 83-87. UU PPTPPU menegaskan pengaturan perlindungan-perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pelapor atas jasanya yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. Bentuk perlindungan hukum pertama yang diberikan UU PPTPPU adalah adanya kewajiban hukum bagi PPATK, penyidik, penuntut umum serta hakim untuk merahasiakan identitas dari pelapor TPPU.³⁸ Hal ini bertujuan agar pelapor merasakan keamanan terhadap serangan balasan dari pelaku TPPU yang dapat membahayakan dirinya, keluarga dan harta benda miliknya. Jika identitas pelapor terbuka maka UU PPTPPU memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk meminta ganti rugi kepada pihak yang membocorkan identitas pelapor. Bentuk perlindungan hukum kedua yang juga merupakan perlindungan hukum paling penting adalah terbebasnya pelapor dari segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana atas segala laporan yang diberikannya kepada penegak hukum.³⁹ Beberapa ketentuan dalam UU PPTPPU menegaskan bahwa pihak pelapor atas kewajibannya melaporkan transaksi keuangan

³⁷ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003

³⁸ Pasal 83 ayat 1 UU PPTPPU

³⁹ Pasal 87 ayat 1 UU PPTPPU

mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 2, pasal 29, dan pasal 87 ayat 1 UU PPTPPU.⁴⁰ Dalam hal ini notaris dan PPAT yang dikategorikan sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan tidak dapat dituntut oleh siapapun baik perdata maupun pidana karena telah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Simpulan

Dengan semakin ketatnya lembaga perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya membuat para pelaku kejahatan untuk mengalihkan modus pencucian uang melalui sarana jual beli *real estate*. Secara langsung maupun tidak langsung modus ini melibatkan notaris dan PPAT dalam memuluskan aksinya. Dengan dimanfaatkannya profesi notaris dan PPAT dalam melakukan pencucian uang oleh pelaku kejahatan telah memberikan berbagai dampak negatif baik terhadap negara maupun berdampak pada profesi notaris dan PPAT itu sendiri. Oleh karena itulah perlunya sebuah Pembaharuan hukum yang lebih kuat guna mencegah dan memberantas TPPU, selain fungsinya untuk mencegah dan memberantas TPPU regulasi ini juga berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada notaris dan PPAT dalam menjalankan jabatannya yang dibayang-bayangi oleh UU PPTPPU.

Konsep notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait TPPU adalah dengan menambahkan ketentuan profesi dalam kategori pihak pelapor sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif oleh pasal

⁴⁰ Pasal 5 UU PPTPPU (1)“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini

Pasal 29 UU PPTPPU Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini

Pasal 87 ayat 1 UU PPTPPU Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

17 ayat 1 UU PPTPPU. Pengkategorian Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor ini memberikan manfaat yang besar kepada negara dan masyarakat, Selain itu manfaat yang secara nyata dirasakan oleh notaris dan PPAT yang dikategorikan sebagai pihak pelapor adalah adanya suatu perlindungan hukum dari negara karena dalam ketentuan pasal 29 UU PPTPPU mengatakan bahwa pihak pelapor dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan pengguna jasa tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Clark, Nicholas *The Impact of Recent Money Laundering Legislation on Financial Intermediaries*, Dick J. Int'l.L, vol. 14,
- Harnidi, Jazim, **Hermeneutika Hukum**, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Mulligan, Daniel *Know Your Customer Regulations and The International Banking System :Towards A General Self Regulatory Regime*, Fordham International Law Journal, vol. 22, 1999
- Remy Sjahdeini, Sutan, **Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme**, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Setiadi, Edi dan Yulia, Rena, **Hukum Pidana Ekonomi**, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Sutedi,Adrian, **Tindak Pidana Pencucian Uang**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008
- Taylor, E. Robert, *Ex-Smuggler Tells of Huge Profits Laundered, Placed at Major Banks*, Wall Street. J. 1988
- Wiyono, R, **Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

JURNAL DAN NASKAH

- Husein, Yunus, **Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional**, Jakarta, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Center for International Law Studies ~ Faculty of Law University of Indonesia), 2004
- Husein,Yunus, *Journal On Anti Money Laundering Urgensi Gatekeeper Sebagai Pelapor Dalam Rezim Anti-Pencucian Uang Indonesia*, Depok, Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Indonesia Indonesia Research Center For Aml-Cft (Irca), 2013

Muslim, Fithriadi, *Journal on anti money Laundering*, **Fungsi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, Depok, Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Indonesia Indonesia Research Center for AML-CFT (IRCA), 2013

Nasution, Bismar, **Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia**, Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008

Nasution, Edi, **Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan**, Jakarta, 2011

Rajagukguk, Erman, **Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang**

MAKALAH

Rejeki, Sri, Tesis, **Perlindungan Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang **Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang **Jabatan Notaris**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang **Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang **Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.**

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang **Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang **Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

INTERNET

Polisi tangkap notaris kredit fiktif BSM

<http://www.antaranews.com/berita/404016/polisi-tangkap-notaris-kredit-fiktif-bsm>, Kamis, 7 November 2013 18:54 WIB, *Ruslan Burhani*